

**TANGGUNG JAWAB YURIDIS ATAS TINDAKAN INDUK
PERUSAHAAN MELAKUKAN PENYERTAAN MODAL
KEPADA ANAK PERUSAHAAN (STUDI KASUS
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR:
1038/K/PDT.SUS/2010)**

HABIB MUHAMMAD YUSUF SIREGAR

ABSTRACT

Since there is no regulation on a group company in Indonesia, it has its own loophole in the law about the liability of holding company in co-financing subsidiaries although Law No. 40/2007 on Corporation states that a holding company and a subsidiary are independent legal entities.

The conclusion of the research was that the holding company, Chuan Son Huat Industrial Group (CSH) which co-financed its subsidiary, PT. Cemerlang Selaras Wood Working (PT. CSWW) cannot be categorized as money because it does not meet the elements of the phrase, 'in amount of money', and the phrase, 'based on the agreement'.

It is recommended that, in having legal certainty concerning law and liability in group companies, Law No. 40/2007 on Corporation be completed and strengthened. The judges who pronounce judgment on bankruptcy cases and other cases which involve holding companies and subsidiaries should be guided by the principles of legal person, separate legal entity, limited liability, and piercing the corporate veil in order to create legal certainty.

Keywords: *Group Company, Judicial Liability, Co-financing*

I. PENDAHULUAN

Perusahaan grup (*group company*) terdiri dari perusahaan induk (*holding company*) dan anak perusahaan (*subsidiary*). Perseroan *holding* (*Parent Company*) kemungkinan besar tidak aktif melakukan kegiatan bisnis atau perdagangan. Hanya sahamnya yang ditanamkan dalam berbagai perseroan anak dan mereka itu yang melakukan dan melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam kondisi yang demikian terkadang tidak ada pemisahan (*separate*) dan perbedaan (*distinction*) mengenai eksistensi ekonomi dan aset, karyawan maupun pemisahan bisnis dan direksi antara *holding* dan *subsidiary*.¹

¹ M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 50.

Kedudukan perusahaan grup dapat dilihat dari perspektif ekonomi dan yuridis. Dalam perspektif ekonomi, perusahaan grup merupakan kesatuan ekonomi yang terdiri dari induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas yang mengendalikan usaha anak perusahaan dalam satu kesatuan ekonomi untuk mendukung kepentingan bisnis yang hendak dicapai oleh perusahaan.

Dari perspektif yuridis, pengesahan status badan hukum anak perusahaan sebagai badan hukum mandiri ini tidaklah menghapuskan status badan hukum anak perusahaan yang bersangkutan, sehingga anak perusahaan tetap dipandang sebagai subjek hukum mandiri. Pengakuan yuridis terhadap badan hukum anak perusahaan menyebabkan berlakunya prinsip hukum perseroan sebagai *legal person* dan prinsip hukum *limited liability*.²

Konstruksi hukum tersebut dalam realitas bisnis saat ini jelas dapat memberikan celah hukum induk perusahaan untuk mengendalikan dan mendominasi pengurusan anak perusahaan. Dominasi induk terhadap anak perusahaan menyebabkan orientasi kepentingan ekonomi anak perusahaan sepenuhnya ditujukan untuk mendukung kepentingan perusahaan grup.³

Secara filosofi, hukum kepailitan adalah untuk mengatasi permasalahan apabila harta seluruh harta debitur tidak cukup untuk membayar seluruh utang-utangnya kepada seluruh krediturnya. Hakikat tujuan adanya kepailitan adalah proses yang berhubungan dengan pembagian harta kekayaan dari debitur terhadap para krediturnya.⁴

Hal yang lain berbeda terhadap tanggung jawab induk perusahaan terhadap anak perusahaan yang pailit pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor :1038 K/Pdt.Sus/2010. Dalam perkara ini Chuan Soon Huat Industrial Group Ltd (selanjutnya disebut CSH) adalah suatu perseroan terbatas yang tunduk pada hukum negara Republik Singapura mengajukan Permohonan Kasasi dengan Termohon Kasasi Royandi Haikal dan Joko Prabowo yang bertindak sebagai kurator PT.Cemerlang Selaras Wood Working (dalam pailit). PT.Cemerlang

² Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hal 4

³ *Ibid.*, hal 5-6

⁴ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, (Medan: USU Press, 2009), hal 16

Selaras Wood Working (selanjutnya di sebut PT.CSWW) merupakan anak perusahaan dari Chuan Soon Huat Industrial Group Ltd yang telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor :37/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT PUSAT tanggal 16 Juni 2010.

CSH merupakan pemegang saham mayoritas atas PT.CSWW dengan memiliki 3.960 saham dari total 4.000 saham yang dikeluarkan. Menurut CSH utang yang timbul oleh PT.CSWW berasal dari pembayaran panjar kepada pihak ketiga atas pembelian kayu papan, mesin, suku cadang dan perlengkapan kayu dikurang hutang dagang akibat penjualan barang jadi kepada CSH.

Status utang-piutang PT.CSWW dengan CSH per tanggal 31 Desember 2009, berdasarkan Surat Pernyataan dan Permintaan Konfirmasi Audit dari Direktur PT.CSWW tertanggal 20 Januari 2010 yang jumlahnya juga disepakati oleh CSH adalah sebesar USD 37.325.123.78 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh tiga koma tujuh puluh delapan Dolar Amerika Serikat) dan SGD 4.300.113.30 (empat juta tiga ratus ribu seratus tiga belas koma tiga puluh Dolar Singapura).

Kurator menyatakan pada pokoknya bahwa tagihan CSH yang sah dan berlandaskan hukum tidak diakui oleh Kurator dengan alasan sebagai berikut:

1. CSH adalah pemegang saham dari PT.CSWW dan PT.CSWW menjual seluruh hasil produksinya kepada CSH, sehingga kurator memandang tagihan CSH kepada kurator (yang memiliki hubungan anak dan induk perusahaan) sebagai suntikan modal atau penyertaan modal.
2. Apabila tagihan CSH yang diajukan melalui kuasa hukumnya, yang jumlahnya sangat besar sebagaimana tersebut di atas diterima oleh kurator, maka kemungkinan kreditor lain, termasuk buruh PT.CSWW, tidak akan mendapatkan bagian karena hasil evaluasi asset (sekitar 70 miliar rupiah) jauh lebih kecil dari jumlah tagihan CSH.

Kemudian majelis hakim berpendapat bahwa hubungan yang terjadi antara CSH dan PT.CSWW merupakan hubungan khusus dalam kaidah hukum perseroan. Hal ini terbukti karena kedudukan PT.CSWW selaku anak perusahaan tidak melakukan transaksi penjualan kepada pihak manapun terkecuali kepda

CSH selaku induk perusahaan. Hal ini jelas merupakan hubungan khusus yang mengakibatkan penerobosan pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham suatu perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b UUPT, sehingga CSH selaku induk perusahaan tidak dapat dikategorikan sebagai kreditur dan otomatis tidak terjadi hubungan utang piutang antara anak dan induk perusahaan serta sikap kurator yang menolak tagihan CSH beralasan hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penting untuk dilakukan penelitian yang berjudul “ Tanggung Jawab Yuridis Atas Tindakan Induk Perusahaan Melakukan Penyertaan Modal Kepada Anak Perusahaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No: 1038/K/PDT.SUS/2010).

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah penyertaan modal yang dilakukan induk perusahaan kepada anak perusahaannya dapat dikategorikan sebagai utang?
2. Bagaimana tanggung jawab yuridis atas tindakan induk perusahaan melakukan penyertaan modal kepada anak perusahaan ?
3. Bagaimana analisis hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung nomor: 1038 K/Pdt.Sus/2010?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep utang dalam hukum kepailitan atas tindakan induk perusahaan melakukan penyertaan modal kepada anak perusahaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab yuridis atas tindakan induk perusahaan melakukan penyertaan modal kepada anak perusahaan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung nomor: 1038 K/Pdt.Sus/2010

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer.

- 1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1038/K/Pdt.Sus/2010

b. Bahan hukum sekunder.⁵

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan kepailitan dalam perusahaan grup.

c. Bahan hukum tertier.⁶

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 53.

⁶ *Ibid.*

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Debitor yang diajukan harus memiliki lebih dari satu kreditor
2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya
3. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*)⁷

Salah satu syarat untuk dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah adanya utang. Dalam proses acara kepailitan konsep utang sangatlah menentukan, oleh karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan akan bisa diperiksa. Dengan demikian, utang merupakan *raison d'être* dari suatu kepailitan.⁸

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak dikenal terminologi penyertaan modal. Namun, dalam kamus istilah menurut peraturan perundang-undangan dijelaskan pengertian penyertaan modal. Penyertaan modal adalah pemilikan sebagian dari modal suatu perusahaan oleh orang pribadi atau badan pada badan lain baik dalam bentuk surat setoran modal atau bentuk lainnya.⁹

Ketika dihubungkan dengan konsep penyertaan modal dalam kasus ini, yaitu ketika induk perusahaan membayar panjar untuk membeli keperluan bahan produksi untuk anak perusahaan dan kemudian hubungan tersebut antara induk dan anak perusahaan membuat Surat Pernyataan dan Permintaan Konfirmasi Audit dimana dalam surat tersebut anak perusahaan menyatakan telah berutang kepada induk perusahaan karena pembayaran panjar.

Jadi, jika dihubungkan hak dan kewajiban dalam perjanjian dengan penyertaan modal. Maka, induk perusahaan berhak untuk menuntut pemenuhan

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal 52

⁸ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik Di Peradilan*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana, 2008), hal 34

⁹ Tim Redaksi Tata Nusa (Penyusun), *Op.Cit.*, hal 443

prestasi yaitu dalam hal ini menerima hasil produksi anak perusahaan dan kemudian dijual induk perusahaan dan kedudukan anak perusahaan berkewajiban untuk memenuhi prestasi yaitu dalam hal ini menyiapkan produksi sesuai dengan kebutuhan dan kemauan oleh induk perusahaan. Namun, yang menjadi permasalahan adalah apakah hak dan kewajiban tersebut dapat digolongkan dalam utang ketika anak perusahaan tidak memenuhi prestasinya, mengingat tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan bagi anak perusahaan untuk mengikuti klausul yang disyaratkan oleh induk perusahaan.

Analisis pasal demi pasal terhadap UUPT mengenai pengaturan dan keberadaan hubungan antara induk dan anak perusahaan masih terbatas, yakni hanya terkait dengan ekspresi induk dan anak perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 84 ayat (2) huruf (b) UUPT yang telah menggunakan kata induk dan perusahaan anak.

Dampak yang timbul dari adanya hubungan hukum antara perusahaan induk dengan perusahaan anak karena adanya penguasaan sebagian besar saham perusahaan anak dan adanya jabatan rangkap yang dilakukan oleh orang yang sama yakni:

1. Perusahaan induk dapat bersuara di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menentukan kebijakan-kebijakan umum atas dasar kepemilikan saham.
2. Terjadinya jabatan rangkap oleh orang yang sama, dapat terjadi apabila direktur, yang sekaligus merupakan pemegang saham mayoritas pada perusahaan induk merangkap sebagai komisaris perusahaan anak.¹⁰

Induk perusahaan dapat diminta pertanggungjawaban apabila dapat dibuktikan, bahwa:

1. Ikutnya induk perusahaan dalam menentukan manajemen perusahaan, keuangan, keputusan bisnis yang menyebabkan kerugian perseroan, misalnya dalam mengambil kredit dari perbankan ikut menentukan jumlah,

¹⁰ Rita Diah Widawati, *Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Perikatan Yang Dilakukakn Oleh Anak Perusahaan*, Tesis, (Medan: Magister Kenotariatan USU, 2009), hal 70

peruntukannya dan penggunaannya sehingga perseroan mengalami kerugian atau pailit.

2. Perbuatan yang dilakukan oleh anak perusahaan untuk kepentingan induk perusahaan.
3. Induk perusahaan secara tidak layak mengabaikan masalah kecukupan finansial dari anak perusahaan.¹¹

Kasus ini bermula ketika PT.CSWW dinyatakan pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan dengan berdasarkan Putusan Nomor 37/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 Juni 2010 berdasarkan permohonan yang diajukan oleh PT.Warna, PT.Gunung Kemala, PT.Setia Mekar Abadi, dan PT.Sinar Bangunan. Berdasarkan putusan tersebut, CSH mengajukan daftar tagihan kepada kurator Royandi Haikal dan Joko Prabowo. CSH memandang tagihan tersebut berasal dari pembayaran panjar kepada pihak ketiga atas *supply* pembelian barang-barang seperti kayu papan (sawn timber), mesin, suku cadang dan perlengkapan kayu untuk dan atas keperluan PT.CSWW serta pinjaman dari CSH kepada PT.CSWW.

Adapun status utang-piutang PT.CSWW dengan CSH sampai tanggal 31 Desember 2009 telah diakui oleh PT.CSWW berdasarkan Surat Pernyataan dan Permintaan Konfirmasi Audit tanggal 20 Januari 2010 sebesar USD 37.325.123.78 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh tiga koma tujuh puluh delapan Dolar Amerika Serikat) dan SGD 4.300.113.30 (empat juta tiga ratus ribu seratus tiga belas koma tiga puluh Dolar Singapura).

Namun, dalam rapat verifikasi dan pencocokan piutang yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2010 kurator menolak tagihan yang diajukan oleh CSH.

Adapun alasan CSH mengajukan permohonan prosedur *renvooi*, yaitu:

1. Termohon sebagai kurator telah melanggar formalitas penyampaian pengakuan dan bantahan atas piutang para kreditor.
2. Pemohon tidak sama dengan PT.CSWW dan karenanya dapat menjadi kreditor.

¹¹ *Ibid.*, hal. 117-118

3. Pemohon tidak berwenang untuk bertindak sebagai direksi dari dan mewakili PT.CSWW dalam mengadakan hubungan hukum dan perdagangan dengan pihak ketiga.
4. Pemohon adalah pemegang saham sekaligus kreditur yang beriktikad baik.
5. Tagihan pemohon atas dasar pembayaran kepada pihak ketiga dan pinjaman pemegang saham telah diakui PT.CSWW dan tercatat dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik.
6. Termohon dengan alasan yang mengada-ada dan tanpa dasar hukum telah menolak tagihan pemohon.
7. Tagihan yang diajukan pemohon kepada termohon sama sekali bukan merupakan dan tidak dapat dianggap sebagai suntikan /penyertaan modal oleh pemohon.
8. Pemohon tidak pernah melakukan pengalihan/kompensasi atas tagihan kepada PT.CSWW ke dalam bentuk saham pada PT.CSWW.
9. Termohon sebagai kurator telah melanggar Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata serta prinsip *paritas creditorium* dan *pari passu prorata parte* karena pemohon berhak mengajukan tagihan dan memperoleh pelunasan utang bersama para kreditor PT.CSWW lainnya.
10. Pengajuan tagihan pemohon terkait dengan jumlah tagihan piutang pemohon, tidak dibantah oleh termohon sebagai kurator.

Majelis hakim memberikan pertimbangan hukum dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti hukum tersebut sebagaimana diuraikan di atas maka pemohon selaku pemegang saham terbesar yang mayoritas melakukan hubungan khusus dengan PT.CSWW berupa pemberian modal untuk membeli bahan baku dan selanjutnya diolah menjadi barang jadi berupa pintu kayu atau kusen dan sebagainya untuk dijual kepada Pemohon karenanya haruslah dipandang sebagai penyertaan modal dimana pihak PT.CSWW (Dalam Pailit) harus mengikuti klausula atau harga yang disepakati oleh pemohon sebagai pemegang saham mayoritas dan PT.CSWW selaku anak perusahaannya.

Menimbang Majelis Hakim berpendapat kedudukan PT.CSWW selaku anak perusahaan yang tidak melakukan transaksi penjualan kepada pihak lain kecuali kepada CSH selaku induk perusahaan (pemegang saham mayoritas) merupakan hubungan khusus yang mengakibatkan penerobosan tanggung jawab terbatas dari pemegang saham suatu perseroan dimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut menurut Majelis haruslah dipandang bukan sebagai kreditor karenanya sikap kurator yang melakukan penolakan terhadap tagihan yang diajukan pemohon beralasan hukum.

Menimbang, karena penolakan tagihan yang dilakukan oleh kurator beralasan menurut hukum maka konsekuensi hukumnya permohonan keberatan melalui prosedur *renvooi* dari pemohon haruslah ditolak seluruhnya.

Dengan adanya prosedur *renvooi* yang dilakukan oleh CSH, maka berdasarkan Putusan Nomor 37/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 14 Oktober 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan keberatan prosedur *renvooi* dari Pemohon Chuan Soon Huat Industrial Group Ltd tanggal 23 Agustus 2010 ;
2. Menetapkan daftar tagihan pada Kreditor PT. Cemerlang Selaras Wood Working (Dalam Pailit) yang dibuat oleh Kurator pada tanggal 5 Agustus 2010 adalah sah ;
3. Membebankan biaya perkara kepada boedel pailit ;

Dari memori kasasi yang diajukan oleh CSH sebagai pemohon, maka CSH mengajukan kasasi dengan alasan-alasan pokok (*posita*) karena:

1. *Judex facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenangannya karena mengadili hubungan kepemilikan saham Pemohon Kasasi/Pemohon dengan perseroan pailit dalam prosedur *renvooi*.
2. Mengenai kesalahan penerapan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, *judex facti* salah menerapkan hukum karena menolak tagihan Pemohon Kasasi/Pemohon berdasarkan penilaian adanya tanggung jawab tidak terbatas.

3. *Judex facti* salah dalam menerapkan hukum karena menganggap tagihan Pemohon Kasasi sebagai setoran modal.
4. *Judex facti* melanggar hukum yang berlaku dengan seolah-olah mengkompensasi tagihan Pemohon Kasasi/Pemohon sebagai modal/saham pada PT.CSWW (dalam pailit).
5. *Judex facti* salah menerapkan hukum dengan tidak menganggap Pemohon Kasasi/Pemohon sebagai Kreditor.
6. *Judex facti* telah salah menerapkan hukum karena telah melanggar asas pembuktian dalam pemeriksaan hukum acara perdata yakni asas pembuktian formal.
7. Mengenai kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan. *Judex facti* kurang lengkap memberikan pertimbangan/alasan dalam putusannya.

Majelis Hakim Kasasi memberikan pertimbangan yakni sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkana, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum pertimbangannya telah tepat, terbukti kedudukan PT.CSWW selaku anak perusahaan yang tidak melakukan transaksi penjualan kepada pihak lain kecuali kepada CSH selaku induk perusahaan (pemegang saham mayoritas) merupakan hubungan khusus yang mengakibatkan penerobosan pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham suatu perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 3 (2) b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga bukan sebagai kreditor dan sikap kurator yang melakukan penolakan terhadap tagihan yang diajukan Pemohon beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CSH tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Dari dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Kasasi memutuskan dengan amar putusan menolak permohonan dari Pemohon Kasasi CSH tersebut.

Dalam hal ini ada 3 (tiga) substansi pokok yang menjadi pembahasan untuk dianalisis yaitu terjadinya penerobosan tanggung jawab terbatas dari pemegang saham suatu perseroan, tagihan CSH dikategorikan sebagai setoran modal atau penyertaan modal, kedudukan CSH tidak dikategorikan sebagai kreditur.

Substansi pertama mengenai penerobosan tanggung jawab terbatas dari pemegang saham suatu perseroan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam pertimbangan majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa CSH telah melanggar Pasal 3 ayat (2) huruf b UUPT karena berdasarkan fakta PT. CSWW selaku anak perusahaan yang tidak melakukan transaksi penjualan kepada pihak lain kecuali kepada CSH selaku induk perusahaan (pemegang saham mayoritas) merupakan hubungan khusus yang mengakibatkan penerobosan tanggung jawab terbatas dari pemegang saham suatu perseroan.

Substansi kedua mengenai tagihan CSH dikategorikan sebagai setoran modal atau penyertaan modal. Majelis hakim memberikan pertimbangan berdasarkan bukti-bukti hukum yang telah diajukan CSH. Oleh karena itu secara nyata CSH selaku pemegang saham terbesar yang mayoritas melakukan hubungan khusus dengan PT.CSWW berupa pemberian modal untuk membeli bahan baku dan selanjutnya diolah menjadi barang jadi berupa pintu kayu atau kusen dan sebagainya untuk dijual kepada CSH dan karenanya haruslah dipandang sebagai penyertaan modal dimana pihak PT.CSWW harus mengikuti klausula atau harga yang disepakati oleh CSH sebagai pemegang saham mayoritas dan PT.CSWW selaku anak perusahaannya.

Substansi ketiga mengenai kedudukan CSH tidak dikategorikan sebagai kreditur. Dalam pertimbangannya, majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa dengan telah terjadinya penerobosan tanggung jawab terbatas dari pemegang saham suatu perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) huruf (b) UUPT. Maka dengan demikian CSH haruslah dipandang bukan menjadi

kreditor karenanya sikap kurator yang melakukan penolakan terhadap tagihan yang ditujukan pemohon beralasan menurut hukum.

Menurut peneliti, pertimbangan yang telah dilakukan oleh majelis hakim adalah sudah tepat dan sesuai menurut hukum. Karena konsekuensi hukum dari adanya suatu tanggung jawab tidak terbatas adalah timbulnya kewajiban untuk ikut menanggung utang yang dimiliki oleh perseroan. Oleh karena itu sudah sepatutnya CSH tidak dapat dikategorikan sebagai kreditor.

IV. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

1. Bahwa tindakan induk perusahaan yang telah melakukan penyertaan modal kepada anak perusahaan tidaklah dapat dikategorikan sebagai utang. Karena penyertaan modal tersebut tidak memenuhi unsur dalam frasa “dapat dinyatakan dalam jumlah uang” dan frasa “berdasarkan perjanjian” menurut konsep utang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU.
2. Tanggung jawab tidak terbatas ini terjadi dalam penyertaan modal yang dilakukan induk perusahaan kepada anak perusahaan. Induk perusahaan harus bertanggung jawab melebihi saham yang telah disetorkan kepada anak perusahaan karena adanya fakta pengendalian dan iktikad buruk kepada anak perusahaan.
3. Terhadap pertimbangan hakim terdapat 3 (tiga) substansi pokok yang menjadi kekhususan perhatian yaitu terjadinya penerobosan tanggung jawab terbatas dari pemegang saham suatu perseroan, tagihan CSH dikategorikan sebagai setoran modal atau penyertaan modal, kedudukan CSH tidak dikategorikan sebagai kreditor.

Saran

1. Untuk mencapai kepastian hukum dalam hubungan hukum, dan tanggung jawab dalam perusahaan grup kiranya perlu untuk menyempurnakan dan memperkuat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya mengenai perusahaan grup.

2. Majelis hakim dalam mengadili perkara-perkara kepailitan dan perkara-perkara lainnya yang melibatkan induk perusahaan dan anak perusahaan senantiasa berpedoman prinsip *legal person, separate legal entity, limited liability*, dan *piercing the corporate veil*. Hal ini dimaksudkan agar keputusan hakim dapat benar-benar menciptakan kepastian hukum.

V. Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

Soemitro, Ronny Hanitjo, *Metodologi Peneletian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990

Harahap, M.Yahya., *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta:Sinar Grafika,2011.

Shubhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik Di Peradilan*, Cetakan Kedua, Jakarta:Kencana, 2008.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.

Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2013.

Sunarmi, 2009, *Hukum Kepailitan*, USU Press, Medan.

Tim Redaksi Tata Nusa (Penyusun), 1999, *Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, 1945-1998*, Tatanusa, Jakarta.

B. Tesis

Widawati, Rita Diah, 2009, *Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Perikatan Yang Dilakukakn Oleh Anak Perusahaan*, Tesis, Magister Kenotariatan USU, Medan.